

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana negara berkembang selalu menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan usaha pembangunan ekonomi. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah umum dan mendasar yang selalu dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Masalah yang dihadapi seperti masalah kesempatan kerja yang sedikit, tingkat upah yang rendah dan produktivitas yang rendah. Masalah ini juga merupakan masalah yang kompleks dimana didalamnya mengandung dimensi ekonomis, dimensi sosial, kesejahteraan dan dimensi sosial politik (Tjiptoherijanto, 2004:5).

Secara potensial negara Indonesia memiliki kemampuan tenaga ahli yang cukup untuk mengembangkannya. Kondisi dari perkembangan tenaga kerja di Indonesia cukup baik dan banyak orang yang bekerja sendiri untuk berbagai keperluan, meskipun yang menjadi tujuan utamanya adalah kebutuhan sehari-hari namun masih banyaknya orang yang kesulitan mencari pekerjaan

2 karena berbagai alasan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang tidak mendukung seperti tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan harapan perusahaan dan lembaga yang ada dan berbagai kendala yang lainnya seperti peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup membuat partisipasi angkatan kerja menurun (Bonerri, Walewangko, & Tumangkeng, 2018).

Untuk dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia maka diperlukan melakukan kegiatan pembangunan ekonomi dimana pembangunan ekonomi pada dasarnya meliputi usaha masyarakat secara keseluruhan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pembangunan ekonomi juga dipandang sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sebab peningkatan ini merupakan suatu pencerminan perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Suatu perekonomian baru bisa dikatakan berkembang apabila pendapatan per kapita menunjukkan kenaikan dalam jangka panjang (Sukirno, 2006:10).

Pembangunan ekonomi di suatu wilayah merupakan salah satu usaha yang positif agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata (Syahputra, 2018). Usaha pembangunan ekonomi itu sendiri dijalankan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun fenomena utama dari ketenagakerjaan itu sendiri adalah pengangguran di mana ketika terdapat lapangan kerja bagi angkatan kerja namun belum mampu menyerap semua jumlah angkatan kerja yang ditawarkan. Tapparan (2017) berpendapat peningkatan penawaran tenaga kerja yang tinggi akan menyebabkan ketimpangan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi namun belum mampu dipenuhi pada lapangan kerja akan menciptakan pengangguran.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dapat menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja adalah

inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara terus-menerus. Dari definisi tersebut, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan terjadi inflasi (Pratama 2008:359) yaitu kenaikan harga suatu komoditas dikatakan naik jika terjadi lebih tinggi daripada harga pokok sebelumnya, bersifat umum jika kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum, dan berlangsung terus-menerus jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu satu tahun.

Inflasi merupakan peristiwa moneter yang sangat penting hampir diseluruh negara. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja. Tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada pengangguran. Bila tingkat inflasi tinggi, dapat menyebabkan angka pengangguran tinggi, ini berarti perkembangan kesempatan kerja menjadi semakin mengecil atau dengan kata lain jumlah tenaga kerja yang diserap juga akan kecil. Dari sini terlihat bahwa pemerintah harus menjalankan kebijakan makro yang tepat. Untuk menjaga tingkat inflasi agar tidak tinggi maka jumlah uang yang beredar di masyarakat juga harus dikendalikan. Inflasi kesempatan kerja sendiri dalam perekonomian mampu melemahkan daya beli masyarakat itu sendiri. Berikut ini adalah tabel tingkat inflasi di Provinsi Jambi :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Tingkat Inflasi Provinsi Jambi**  
**Tahun 2010-2021**

Tahun	Tingkat Inflasi (%)	Perkembangan (%)
2010	10,52	-
2011	2,76	(73,76)
2012	4,22	52,89
2013	8,74	107,11
2014	8,72	(0,23)
2015	1,37	(84,29)
2016	4,54	231,39
2017	2,68	(40,97)
2018	3,02	12,69
2019	1,27	(57,95)
2020	3,09	143,31
2021	1,67	(45,95)
Rata-Rata		22,20

**Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2022**

**Keterangan: ( ) = Penurunan**

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diatas dapat dilihat bahwa tingkat inflasi di Provinsi Jambi berfluktuasi cenderung menurun. Inflasi tertinggi di Provinsi Jambi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 10,52% dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,27%. Sehingga total rata-rata perkembangan Laju inflasi dalam waktu 12 tahun terakhir adalah sebesar 22,20%.

Faktor yang berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Jhingan (2004) pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong penyediaan berbagai sarana dan prasarana perekonomian yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Indikator pembangunan ekonomi suatu negara terletak pada pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi tidak semata- mata tergantung pada sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka. Pertumbuhan ekonomi

merupakan alat indikator utama sebelum indikator lainnya. Ini menjelaskan mengapa pemerintah sering hanya menekankan tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi mengabaikan indikator pembangunan lainnya, terlebih fakta yang terjadi di masyarakat. Seringkali, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak menjangkau kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pada dasarnya diantara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja memiliki hubungan yang positif, yaitu apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka kesempatan kerja yang tercipta juga meningkat maka akan mengurangi pengangguran atau juga dapat dikatakan jika pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah meningkat maka secara tidak langsung akan terjadi penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi selalu dipakai sebagai ukuran terciptanya lapangan kerja baru untuk mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu tidak meratanya pertumbuhan ekonomi tersebut serta mungkin kesempatan kerja dipengaruhi oleh faktor lain seperti investasi dan yang lainnya. (Samuelson dan Nordhaus, 1992:78). Berikut adalah tabel dari Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi:

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi**  
**Tahun 2010-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2010	7,35	-
2011	7,86	6,94
2012	7,03	(10,56)
2013	6,84	(2,70)
2014	7,36	7,60
2015	4,21	(42,79)
2016	4,37	3,80
2017	4,60	5,26
2018	4,69	1,96
2019	4,35	(7,25)
2020	-0,44	(110,11)
2021	3,66	(931,82)
Rata – Rata		(98,15)

**Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2022**

**Keterangan: ( ) = Penurunan**

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, laju pertumbuhan ekonomi berfluktuasi tetapi cenderung menurun. Seperti pada tahun 2015 sebesar 4,21% langsung mengalami penurunan pada perkembangannya sebesar -42,79%. Dan perkembangannya kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 3,80%, dengan rata-rata total selama 12 tahun terakhir sebesar -98,15%.

Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan manusia yang mampu berdampak pada kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh upah minimum. Menurut Henry dan Danang (2013) upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya karena pemenuhan kebutuhan yang layak. Kebijakan pemerintah tentang penetapan upah minimum dapat berpengaruh terhadap angka pengangguran. Oleh karena itu

pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan dengan baik kebijakan dalam menetapkan tingkat upah. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus di bayarkan perusahaan pada pekerjanya. Upah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penawaran dan permintaan tenaga kerja, adanya perubahan upah akan mempengaruhi besar kecilnya penawaran kerja. Jika tingkat upah relative rendah maka jumlah tenaga kerja yang di tawarkan akan lebih sedikit.

Adanya kenaikan upah minimum akan meningkatkan kesempatan kerja. tentang Upah Minimum Provinsi dan kesempatan kerja yang menyatakan bahwa kenaikan upah bisa menyebabkan meningkatkan kehidupan yang layak bagi pekerja, tetapi peningkatan upah minimum provinsi yang terlalu tinggi yang tidak disertai dengan peningkatan produktivitas kerja juga akan mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan menurunkan produksi, menggunakan teknologi yang lebih padat modal dan menaikkan harga jual barang yang kemudian justru akan mendorong inflasi. Menurut data yang di dapat dari Kementrian Ketenagakerjaan biasanya upah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, begitupun upah minimum yang ditetapkan pemerintah Provinsi Jambi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Upah Minimum Provinsi Jambi**  
**Tahun 2010-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Upah Minimum Provinsi (Rp)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2010	900.000	-
2011	1.028.000	14,22
2012	1.142.500	11,13
2013	1.300.000	13,78
2014	1.502.230	15,55
2015	1.710.000	13,83
2016	1.906.650	11,50
2017	2.063.948	8,24
2018	2.243.718	8,71
2019	2.400.000	6,96
2020	2.630.162	9,59
2021	2.630.162	0,00
Rata – Rata		10,32

**Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2022**

**Keterangan: ( ) = Penurunan**

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, kenaikan upah minimum di Provinsi Jambi dari tahun 2012-2020 terus mengalami peningkatan. Meskipun peningkatan setiap tahunnya cenderung berfluktuatif dan tidak terlalu banyak. Perkembangan upah minimum pada tahun 2021 mengalami stagnan seperti pada tahun 2020. Sehingga total rata-rata upah minimum Provinsi Jambi dalam waktu 12 tahun terakhir yaitu sebesar 10,32%.

Jumlah penduduk yang semakin besar juga dapat membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar. Ini berarti semakin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensinya bahwa perekonomian harus selalu menyediakan

lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru sehingga menciptakan kesempatan kerja bagi yang membutuhkan.

Kesempatan kerja menjadi penting bagi masyarakat sebagai sumber kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Permasalahan kesempatan kerja bukan hanya tentang ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja, tetapi juga apakah dapat lapangan kerja yang ada cukup mampu memberi timbak balik yang cukup bagi para pekerja. Dengan adanya ketersediaan lapangan kerja yang memadai tentu akan mempercepat proses pembangunan ekonomi apalagi disertai dengan produktivitas yang tinggi. Suatu peluang untuk mendapatkan pekerjaan diberbagai sektor ekonomi disebut dengan kesempatan kerja.

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang atau tenaga kerja yang dapat terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi, kesempatan kerja ini akan menyerap semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Data kesempatan kerja dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (Tambunan, 2001). Berikut adalah tabel dari perkembangan kesempatan kerja di Provinsi Jambi:

**Tabel 1.4**  
**Perkembangan Kesempatan Kerja Provinsi Jambi**  
**Tahun 2010-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Kesempatan Kerja (Jiwa)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2010	1.360.022	-
2011	1.434.998	5,51
2012	1.423.624	(0,79)
2013	1.382.471	(2,80)
2014	1.491.038	7,85
2015	1.550.403	3,98
2016	1.624.522	4,78
2017	1.657.817	2,04
2018	1.721.362	3,83
2019	1.691.782	(1,71)
2020	1.739.003	2,79
2021	1.746.840	0,45
Rata – Rata		2,36

**Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2022**

**Keterangan: ( ) = Penurunan**

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, kesempatan kerja diprovinsi jambi berfluktuasi cenderung meningkat. Seperti pada tahun 2019 sebesar 1.691.782 orang mengalami penurunan pada perkembangan sebesar -1,71%. Dan perkembangannya kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 2,79%, dengan rata-rata total selama 12 tahun terakhir sebesar 2,36%.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam tulisan yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jambi Periode 2010-2021”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan data pada latar belakang diatas dapat diuraikan identifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Perkembangan Tingkat Inflasi di Provinsi Jambi dalam 12 tahun berfluktuasi cenderung menurun dengan rata-rata tingkat penurunan sebesar 22,20%.
- 2) Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi selama 12 tahun terakhir berfluktuasi cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar - 98,15%.
- 3) Perkembangan upah minimum di Provinsi Jambi dalam waktu 12 tahun terakhir berfluktuasi cenderung staknan dengan rata-rata sebesar 10,32%.
- 4) Perkembangan jumlah kesempatan kerja di Provinsi Jambi selama 12 tahun terakhir berfluktuasi peningkatan 2,36%.

## 1.3 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara simultan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jambi tahun 2010-2021?
2. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara parsial terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jambi tahun 2010-2021?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan uraian di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara simultan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jambi tahun 2010-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara parsial terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jambi tahun 2010-2021.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis diantaranya :

1. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dapat menjadi acuan pendukung bagi peneliti lain yang tertarik dalam bidang penelitian khususnya mengenai kesempatan kerja.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah provinsi Jambi sebagai gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja di Provinsi Jambi, dan sebagai acuan untuk membuat kebijakan mengenai masalah kesempatan kerja dan pemanfaatan ekonomi sumber daya manusia.